

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia yang berada di penjuru negeri ini pasti memerlukan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya yang mana hal ini dapat menciptakan adanya hubungan sosial. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Dr. Johannes Garang yang mengatakan manusia adalah makhluk sosial karena manusia merupakan makhluk yang berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri. Dengan artian bahwa setiap manusia ini akan cenderung merasa kesulitan jika segala hal yang ada dalam hidupnya ini dijalankan hanya seorang diri dan seorang manusia akan memilih hidup secara berdampingan dengan manusia lainnya yang diharapkan dapat memudahkan dalam memperoleh segala kebutuhan yang diperlukan sehingga tidak hanya dijalani oleh seorang diri namun bisa dikerjakan secara bersama. Hal ini dilakukan oleh manusia dalam menjalin interaksi antar individu sehingga dapat mempermudah segala hal yang akan dihadapi kedepannya. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan antara dua individu atau lebih, yang mana tingkah laku dari individu ini dapat mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki individu yang lain ataupun sebaliknya (Santoso, 2017). Dengan adanya interaksi ini, tiap manusia akan saling mengerti dan memiliki rasa kepedulian antar satu sama lain sehingga ketika terdapat individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dimilikinya ini dapat diberikan bantuan oleh individu yang telah saling berinteraksi sebelumnya. Suatu kesatuan manusia yang berada dalam satu lingkungan yang berinteraksi berdasarkan sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas yang sama antara satu sama lain disebut dengan masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Membahas mengenai masyarakat tentu saja tidak akan terlepas dari adanya masalah yang timbul baik itu dari individu maupun kelompok. Masalah sendiri adalah kata yang sering kita dengar sehari-hari, tidak ada satupun manusia yang luput dari masalah, baik masalah yang bersifat ringan atau masalah yang sifatnya besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2022) masalah merupakan

sesuatu yang harus diselesaikan. Adapun pengertian masalah menurut para ahli yaitu menurut Sugiyono masalah memiliki pengertian yaitu sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan suatu hal yang benar-benar terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, ataupun antara rencana dengan pelaksana (Sugiyono, 2009). Dari pengertian tersebut dapat digaris bawahi bahwa masalah merupakan suatu kondisi yang harus diselesaikan yang disebabkan karena adanya penyimpangan sehingga perlu untuk diluruskan. Masalah yang terjadi di masyarakat ini biasanya terjadi karena terdapat banyak perbedaan yang ada dalam suatu lingkungan hidup. Yang mana hal ini menciptakan masalah-masalah yang seringkali dihadapi oleh masyarakat ini sangatlah beragam baik itu dari masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah pembangunan, dan lain-lain. Masalah-masalah ini yang semakin lama bukannya menurun melainkan sebaliknya

Berbicara terkait masalah, Indonesia merupakan negara berkembang yang tentu saja dihadapkan dengan beragam masalah salah satunya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sendiri merupakan sebuah kunci utama untuk menuju kesejahteraan dalam masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ialah terkait dengan rendahnya tingkat kualitas hidup masyarakat serta kependudukan. Kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fadli Jalal mengemukakan bahwa “jumlah penduduk yang besar apabila berkualitas akan menjadi potensi sumber daya manusia yang luar biasa, namun kenyataannya kualitas penduduk Indonesia masih memprihatinkan”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik bahwa penduduk merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pembangunan yang baik ini hanya akan bisa terwujud oleh penduduk yang memiliki kualitas yang baik juga. Permasalahan Kependudukan, pada dasarnya tidak hanya menggambarkan mengenai permasalahan terkait demografi saja, melainkan membahas lebih dari itu seperti masalah kependudukan ini mencakup dimensi yang luas yaitu mengenai degradasi lingkungan dan kemiskinan (Faturachman, Wicaksono, Setiadi, & Latief, 2004)

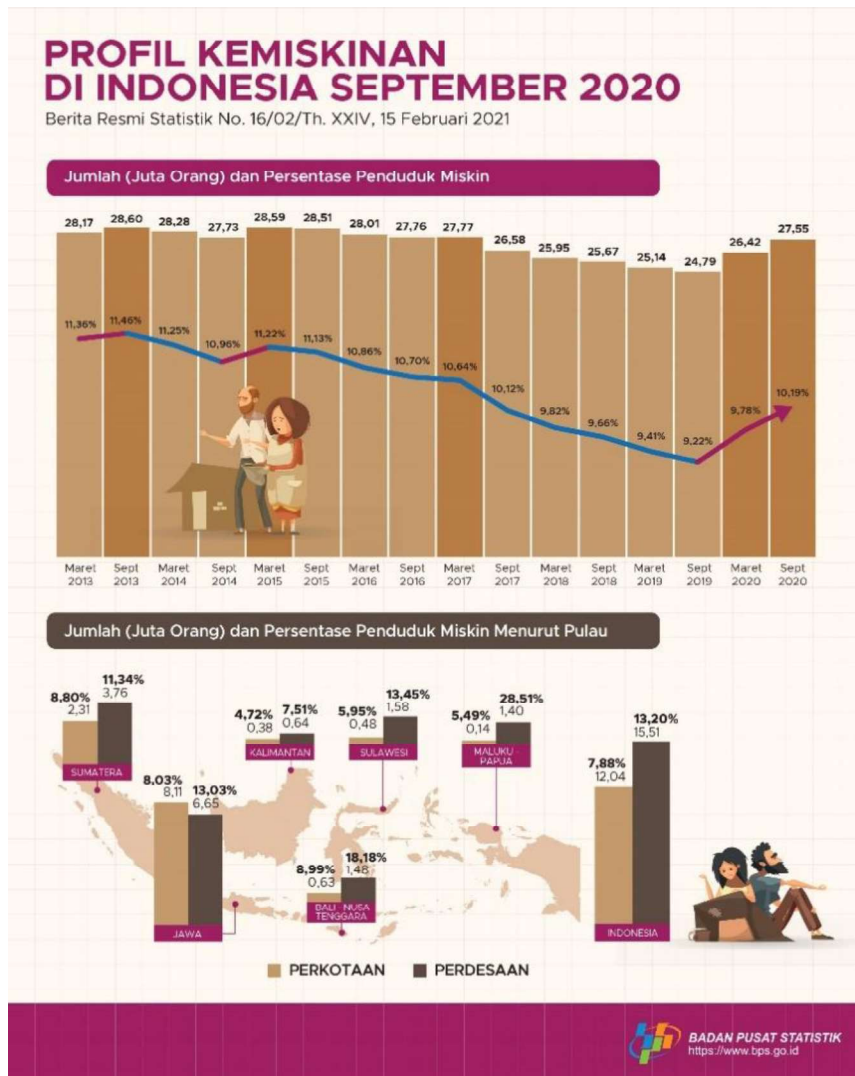
Berikut ini adalah jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2019.



Gambar I. 1 Jumlah Penduduk Indonesia

Sumber: (Katadata, 2022)

Dari infografis diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2015 hingga 2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan per tahunnya kurang lebih 3 (tiga) juta penduduk. Tingginya pertambahan jumlah penduduk yang ada ini disebabkan oleh angka kelahiran yang tiap tahunnya terus meningkat. Dengan adanya kepadatan jumlah penduduk yang timbul di Indonesia ini akan mempengaruhi pada banyak hal yang mana ini dibutuhkan oleh manusia selain kebutuhan pokoknya yaitu makanan dan keperluan material lainnya seperti wisata dan ruang untuk kecantikan. Penduduk yang memiliki jumlah berlebih ini akan mengikis seluruh kebutuhan tersebut, Peningkatan jumlah penduduk yang cepat ini menciptakan kota yang sedemikian besar yang ada seperti saat ini. Jumlah penduduk Indonesia saat ini dapat dikatakan telah meningkat begitu cepat yang mana ini mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Ini dapat dilihat dari infografis dibawah ini



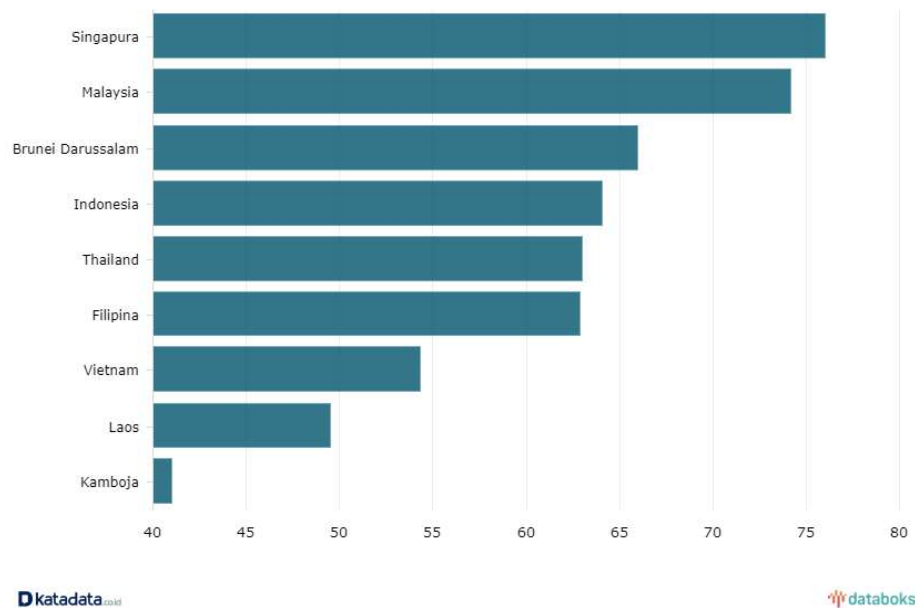
Gambar I.2 Infografis Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami kenaikan pada laju pertumbuhan kemiskinan di Indonesia. Jumlah terakhir yang tercatat untuk tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu 27,55 juta penduduk di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021). Angka tersebut bukan merupakan angka kecil untuk negara sebesar Indonesia ini. Maka dari itu, kemiskinan menjadi salah satu poin penting pembahasan pada tema utama dalam pembangunan,

yang mana keberhasilan dan kegagalan pada suatu wilayah ini seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Berikut adalah peringkat keterampilan SDM di Negara ASEAN berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI)

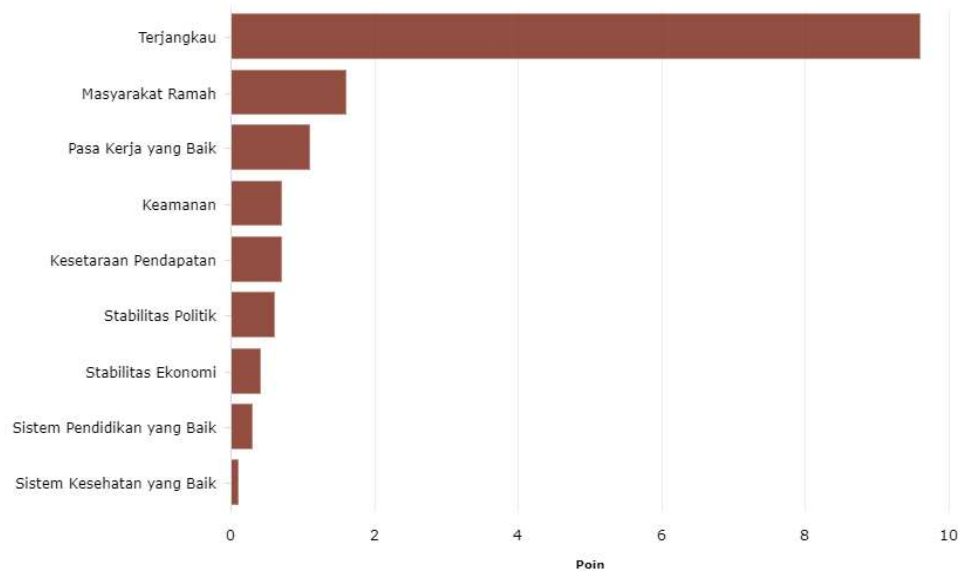


Gambar I.3 Peringkat Keterampilan SDM di 9 Negara ASEAN Berdasarkan GCI

Sumber: (Katadata, 2022)

Berdasarkan peringkat keterampilan SDM di 9 negara ASEAN diatas, ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tinggi bertolak belakang dengan kualitas SDM yang masih rendah, hal ini dipertegas oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengemukakan bahwa *Human Capital Index* (HCI) Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain. Tidak hanya tertinggal dengan negara maju, Indonesia bahkan tertinggal jauh dengan negara-negara ASEAN, seperti Singapura dan Vietnam.

Berikut ini infografis kualitas hidup di Indonesia jika dilihat dari sembilan indikator dibawah ini.



Gambar I.4 Indikator Kualitas Hidup di Indonesia

Sumber: US News and World Report, 2019

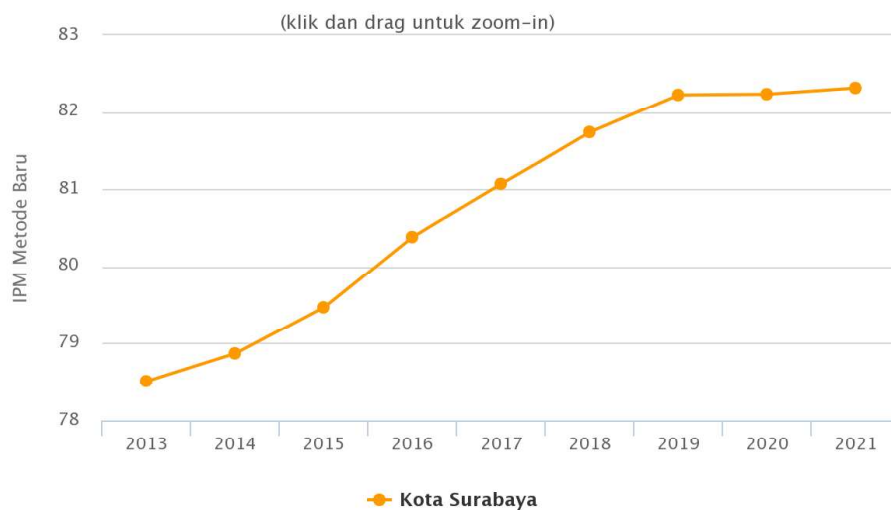
Berdasarkan Data *US News and World Report* dalam 2019 *Best Countries*, yang menunjukkan bahwa kualitas hidup di Indonesia berada di peringkat ke-40 terhitung dari 80 negara yang dilakukan survei. Skor Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara yang ada pada survei tersebut, Indonesia memperoleh skor 1,8 dari skala 10. Dengan hasil yang dapat dikatakan sangat kurang baik itu dikarenakan terdapat sembilan indikator yang membentuk kualitas hidup dengan memiliki rata-rata skor pada tiap indikatornya sebesar 1,7. Dari sembilan indikator penilaian, setidaknya terdapat delapan indikator penilaian yang memperoleh nilai dibawah dua. Dari kedelapan indikator tersebut yang memperoleh nilai dibawah dua terdapat indikator yang perlu digaris bawahi yaitu terkait dengan stabilitas ekonomi yang memiliki nilai sangat rendah (Jayani, 2019). Dengan tingginya jumlah penduduk Indonesia hal ini tentu saja didorong oleh pertumbuhan penduduk di daerah-daerah yang ada di Indonesia salah satunya Surabaya yang memiliki tingkat jumlah penduduk sebagai berikut.

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Surabaya

Tahun	Jumlah Penduduk
2015	2.943.528
2016	3.016.653
2017	3.074.883
2018	3.094.732
2019	3.159.481
2020	2.970.730
2021	2.970.952

Sumber: (BPS Kota Surabaya, 2022, hlm. 55)

Berdasarkan data jumlah penduduk tersebut dapat disimpulkan bahwa, Kota Surabaya pada tahun 2021 memiliki laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 0,28 persen. Tingkat kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 8.612 jiwa/km² yang mana Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Tambaksari yaitu dengan 215.175 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Sawahan dengan jumlah penduduk mencapai 189.252 jiwa dan Kecamatan Kenjeran dengan jumlah penduduk mencapai 181.917 jiwa.



Gambar I.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya

Sumber: BPS Kota Surabaya. 2022

Berdasarkan infografis diatas dapat dilihat bahwa tingkat Indeks Pembangunan Kota Surabaya tiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan

berjalannya program yang telah dilakukan. Program sendiri menurut KBBI (2022) merupakan rancangan mengenai asas serta (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik bahwa program merupakan suatu hal yang menjelaskan mengenai asas dan kegiatan yang mana didalamnya membahas mengenai tujuan dan cara-cara dalam kegiatan yang akan dijalankan. Program juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang didalamnya berisi kesimpulan dari beberapa tujuan yang saling bergantung dan berhubungan, serta untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Program ini biasanya mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah naungan administrasi yang sama, atau sasaran yang saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi, yang mana ini harus dilaksanakan dengan cara bersamaan atau dengan cara berurutan (Muhaimin, Suti'ah, & Listyo Prabowo, 2010a).

Untuk menyikapi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Indonesia sendiri tengah memperoleh cara dalam dengan melakukan pengawasan pada jumlah peningkatan penduduk ini yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Definisi Keluarga Berencana menurut Undang-undang nomor 52 tahun 2009 merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Undang-Undang No. 52 Tahun 2009). Tujuan dari adanya program KB ini yaitu:

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan

4. menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan (Undang-Undang No. 52 Tahun 2009).

Pada dasarnya hasil dari program KB ini bermanfaat sebagai pembangunan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Upaya untuk mengentaskan masalah kependudukan ini tentunya perlu memaksimalkan pelaksanaan program KB ini tentu akan menjadi pilihan terbaik bagi pemerintah Indonesia saat ini. Untuk Pelaksanaan program KB ini diamanahkan kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional sebagai sebuah lembaga non Kementerian. Program Keluarga Berencana ini merupakan sarana bagi masyarakat di Indonesia untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, dan kesejahteraan merupakan hak bagi semua manusia. Kesejahteraan yang dimaksud bukanlah kesejahteraan untuk personal, keluarga ataupun kelompok, tetapi merupakan persoalan bersama dengan pemerintah karena pemerintah disini sebagai penyelenggara negara yang mana memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan bagi masyarakatnya. BKKBN sendiri merupakan lembaga resmi pelaksana teknis program yang mana pelaksana kegiatan ini terstruktur secara hierarkis dan juga terkoordinasi mulai dari tingkat yang tertinggi yaitu dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga pada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berada di kecamatan dan kelurahan yang telah ditempatkan.

Sesuai yang tertera pada Undang-undang nomor 52 tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Salah satu aktualisasi Undang-undang tersebut yang khususnya dalam pembangunan keluarga melalui program Kampung Keluarga Berencana yang merupakan penguatan pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang mana ini dilakukan dengan melakukan penyusunan kegiatan dengan memperkuat pencapaian target secara langsung dan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.

Capacity Building merupakan tema strategis pada implementasi Kampung KB yang meliputi pendidikan pranikah yang didalamnya terkandung informasi usia ideal pernikahan, jumlah anak yang ideal, jarak ideal untuk melahirkan, hingga perencanaan pendidikan, kesehatan, ekonomi, untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat. Tujuan pembentukan Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung dengan harapan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas (Aji & Yudianto, 2020)

Berbicara terkait Kampung KB, mendengar kata “Kampung”. Hal yang terbesit di pikiran masyarakat umum pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari berbagai orang atau keluarga dengan segala keterbatasan, tertinggal, kumuh, terpencil, dan berbagai ungkapan lainnya yang terkait dengan kata “Kampung”. Hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kata “Kampung” identik dengan ungkapan” seperti itu (BKKBN, 2015). Namun hal itu telah ditepis dengan adanya Kampung KB yang mana sejak dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) tepatnya pada bulan Januari 2016. Kampung KB ini dibentuk untuk menjawab tantangan yang mana BKKBN ini dituntut agar tidak memfokuskan program ini hanya pada masalah pengendalian penduduknya saja namun juga masalah pembangunan keluarga yang perlu memperoleh perhatian (BKKBN, 2015). Kampung Keluarga Berencana sendiri merupakan salah satu program dari KKBPK yang melibatkan seluruh bidang yang berkaitan dengan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Program ini juga bersinergi dengan *stakeholders*, dan mitra kerja lain yang berasal dari berbagai instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Pemerintah meluncurkan program kampung KB ini dengan tujuan untuk mencapai cita-cita negara Indonesia, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta sila kelima pada Pancasila.

Pada tanggal 16 Februari 2021 nama Kampung Keluarga Berencana diubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) No. 834.4/2879/SJ Tahun 2020 mengenai

Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas. Perubahan ini dilakukan karena Kampung KB dipandang hanya berada di naungan BKKBN dan segala hal yang terkait dengan Keluarga Berencana (KB), padahal di dalam Kampung KB ini merangkul segala macam sektor baik itu dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan. Kampung Keluarga Berkualitas memiliki definisi yang tidak berbeda dengan sebelumnya yang mana sebagai suatu satuan wilayah setingkat desa yang mana terdapat adanya integrasi antara penyelenggaraan pemberdayaan dengan penguatan institusi keluarga yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan, keluarga, dan juga masyarakat.

Melalui program Kampung KB ini diharapkan pada pelaksanaan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dan juga program-program pembangunan lainnya dapat berjalan bersamaan dan juga secara terpadu (HM & Indrawadi, 2019). Yang mana ini sesuai dengan amanat yang ada dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama pada agenda prioritas ketiga yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Maka dari itu cukup menjawab apabila pembangunan kependudukan mulai difokuskan dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung, karena apabila seluruh daerah pinggiran ini maju maka sudah tentu negara akan menjadi maju dengan adanya tujuan yang sejalan dengan nawacita Presiden yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (BKKBN, 2017). Tujuan Kampung KB ini sebagai penyuluh kampung tentunya harus memiliki komitmen agar dapat selalu berjuang dalam menyukseskan program Kampung KB, agar apa yang masyarakat harapkan ini dapat tercapai dalam menciptakan Kampung KB yang sukses tidak hanya dalam permasalahan KB saja namun beberapa sektor yang diandalkan oleh kampung tersebut.

Dalam pelaksanaan Kampung KB ini memerlukan dukungan seluruh pihak yang ada baik itu dari pemerintah dan lebih lebih dari pihak swasta untuk dapat bekerja sama dan bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tempat tersebut, dan dilaksanakan di tingkat pemerintah yang paling rendah yaitu tingkat RT (BKKBN, 2017). Pada program Kampung KB ini tentunya diperlukan adanya penyuluh,

sehingga program yang dikerjakan ini dapat berjalan dengan arahan dari penyuluh tersebut. Sebagai garda terdepan dalam melangsungkan kegiatan lapangan dalam melangsungkan tugas utamanya sehari-hari diantaranya mencari, membina, dan juga mendampingi. Sebagai pengelola dan pelaksana program di lini lapangan Penyuluh KB dilengkapi dengan berbagai kemampuan, baik itu kemampuan mengenai *leadership*, manajerial ataupun kemampuan teknis operasional, serta harus memiliki kompetensi dalam rangka menjawab persoalan KKBPK dimasa depan. Kompetensi ialah sinergitas pengetahuan, keterampilan, atau sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan standar kerja yang ditetapkan. Maka dari itu untuk meningkatkan hal tersebut dilakukannya pelatihan dan pendampingan dengan tujuan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan secara teknis dari tenaga lapangan atau penyuluh program.

Kampung KB adalah satuan wilayah yang setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu yang mana ini dilakukan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB hingga saat ini telah menyebar merata di seluruh Indonesia yang mana seluruh provinsi yang ada di Indonesia telah melakukan program Kampung KB ini, total jumlah Kampung KB hingga saat ini kurang lebih mencapai 16422 Kampung KB yang terdiri dari 2716 RW, 2464 Dusun, dan 11242 Desa. Untuk rincian lengkap dapat dilihat di tabel dibawah ini

Tabel I.2 Jumlah Kampung KB di Indonesia Per-Juni 2022

No.	Provinsi	Jumlah Kampung KB
1.	Aceh	595
2.	Sumatera Utara	835
3.	Sumatera Barat	390
4.	Riau	310
5.	Jambi	202
6.	Sumatra Selatan	497
7.	Bengkulu	258
8.	Lampung	501
9.	Bangka Belitung	98
10.	Kepulauan Riau	122

11.	DKI Jakarta	136
12.	Jawa Barat	2750
13.	Jawa Tengah	2278
14.	DI Yogyakarta	188
15.	Jawa Timur	1429
16.	Banten	408
17.	Bali	133
18.	Nusa Tenggara Barat	288
19.	Nusa Tenggara Timur	646
20.	Kalimantan Barat	343
21.	Kalimantan Tengah	290
22.	Kalimantan Selatan	316
23.	Kalimantan Timur	299
24.	Kalimantan Utara	79
25.	Sulawesi Utara	339
26.	Sulawesi Tengah	345
27.	Sulawesi Selatan	679
28.	Sulawesi Tenggara	437
29.	Gorontalo	155
30.	Sulawesi Barat	175
31.	Maluku	238
32.	Maluku Utara	220
33.	Papua	531
34.	Papua Barat	283
Jumlah		16793

Sumber: BKKBN

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kampung KB terbanyak di dominasi oleh provinsi yang berada di pulau jawa diantaranya Jawa Barat memiliki 2585, Jawa Tengah memiliki 2239, dan Jawa Timur memiliki 1430. Hal ini terjadi karena pulau jawa merupakan pulau yang memiliki populasi penduduk terbanyak di Indonesia di pulau Jawa dengan total penduduk sebesar 151,6 juta jiwa atau 56,1 % penduduk Indonesia berada di pulau Jawa (Angga, 2021). Dari beberapa provinsi yang ada dipulau jawa, terdapat provinsi Jawa Timur yang mana ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia. Berbicara mengenai Jawa Timur, tentunya tidak terlepas dengan Ibu kota provinsi ini yaitu Surabaya yang lebih dikenal sebagai kota pahlawan. Kota Surabaya yang

merupakan pusat ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur ini yang menjadi magnet untuk penduduk luar kota Surabaya datang sehingga masalah kependudukan tidak dapat terhindarkan di Kota Surabaya. Untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya yang mana masih banyak kampung kumuh dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, BKKBN Jawa Timur Perwakilan Kota Surabaya dan Bapermas KB Kota Surabaya yang melakukan pencahangan terhadap Kampung KB.

Surabaya sebagai ibu kota provinsi tentu saja memiliki permasalahan mengenai kependudukan dan kualitas hidup masyarakat, maka dari itu Surabaya melaksanakan program Kampung KB untuk menjawab permasalahan tersebut. Berikut adalah Kampung KB yang ada di Surabaya.

Tabel I.3 Jumlah Kampung KB di Surabaya

No.	Kecamatan di Kota Surabaya	Jumlah Kampung KB
1.	Karangpilang	1
2.	Wonocolo	1
3.	Rungkut	1
4.	Wonokromo	1
5.	Tegalsari	1
6.	Sawahan	1
7.	Genteng	1
8.	Gubeng	1
9.	Sukolilo	1
10.	Tambaksari	1
11.	Simokerto	1
12.	Pabean Cantian	1
13.	Bubutan	1
14.	Tandes	1
15.	Krembangan	1
16.	Semampir	2
17.	Kenjeran	1
18.	Lakarsantri	1
19.	Benowo	1

20.	Wiyung	1
21.	Dukuh Pakis	1
22.	Gayungan	1
23.	Jambangan	1
24.	Tenggilis Mejoyo	1
25.	Gunung Anyar	1
26.	Mulyorejo	1
27.	Sukomanunggal	1
28.	AsemRowo	1
29.	Bulak	1
30.	Pakal	1
31.	Sambikerep	1
Jumlah		32

Sumber: kampungkb.bkkbn.go.id

Surabaya merupakan salah satu kota yang menerapkan program Kampung KB dan Program Kampung KB ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan sebagai wadah dalam menambah keahlian. Pemberdayaan Masyarakat sendiri merupakan proses dalam mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan juga memperkuat posisi tawar-menawar pada masyarakat lapisan bawah terhadap adanya kekuatan-kekuatan penekan pada segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro, 2002).

Disinilah perlu peran dari adanya penyuluh Keluarga Berencana yang tentunya perlu memahami karakteristik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang disuluh. Jika perlu, data permasalahan yang telah dimiliki hingga pada tingkat keluarga ini memuat 8 fungsi keluarga. Bila penyuluh KB dapat menjadi fasilitator dan informator yang handal sehingga nantinya masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran yang lebih dalam mendukung program Kampung KB. Maka dari itu dalam pelaksanaan program Kampung KB diperlukan Penyuluh KB yang memiliki kompetensi memadai sehingga dapat menyalurkan program Kampung KB dengan baik kepada masyarakat. Sebelum adanya program Kampung KB ini kebanyakan Penyuluh KB yang ada belum menerima pelatihan secara umum mengenai permasalahan yang ada dimasyarakat dan hanya terpaku pada urusan mengenai

Keluarga Berencana. Sehingga dengan adanya program Kampung KB ini secara tidak langsung mengharuskan Penyuluh KB untuk memahami seluruh permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Untuk mengetahui standar kompetensi yang dimiliki oleh Penyuluh KB tersebut, pada tahun 2017 telah dilakukan sebuah uji kompetensi untuk seluruh Penyuluh KB yang ada di Indonesia. Untuk di Jawa timur, uji kompetensi ini diikuti oleh kurang lebih 2.255 orang Penyuluh KB dengan hasil sebagai berikut (Nurhajati, 2018).



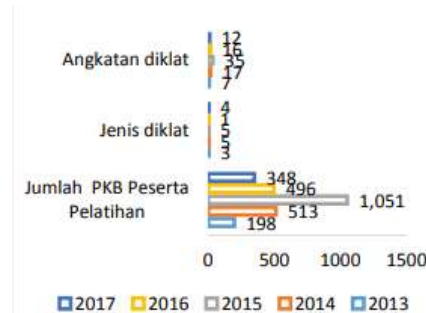
Gambar I.6 Data Uji Kompetensi Penyuluh KB di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Data Uji Sertifikasi BKKBN

Dari gambar 1.6 dapat disimpulkan bahwa kebanyakan para Penyuluh KB ini masih perlu untuk ditindaklanjuti pengembangan, yakni 1.401 orang (62,1%). Penyuluh KB yang nilainya diatas standar ini berjumlah 822 orang (36,5%). Dan untuk uji kompetensi yang sesuai standar itu hanya sebanyak 32 orang (1,4%).

Pada tahun 2013-2017 bidang pelatihan dan pengembangan yang ada di BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk kategori yang khusus ditujukan bagi Penyuluh KB. Dalam kurun waktu tersebut telah dilatih kurang lebih 2.606 Penyuluh KB atau dengan rata-rata 521.1 orang per tahun. Jika ini dibandingkan dengan jumlah peserta uji kompetensi sebanyak 2.255 orang, yang artinya dalam 1 tahun hanya ada 23% dari keseluruhan Penyuluh KB yang dapat diberikan pembekalan melalui kegiatan Diklat dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Untuk jumlah jenis pelatihan yang diberikan tiap tahunnya ini masih sangat terbatas jika harus dibandingkan dengan

Kompetensi yang perlu dipelajari oleh Penyuluh KB. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut (Nurhajati, 2018).



Gambar I.7 Gambaran Diklat Bagi Penyuluh KB Tahun 2013-2017

Sumber: SIDIKA BKKBN

Berdasarkan gambar 1.7 dapat ditarik kesimpulan bahwa angkatan pelatihan dalam kurun waktu 2013-2017. Jumlah angkata Diklat bagi Penyuluh KB dalam 5 tahun yaitu pada tahun 2013 hingga 2017 ini rata-ratanya adalah 17.4 angkatan pertahun. Data ini diperoleh sebelum program Kampung KB dibentuk, sehingga masih belum menyeluruh pelatihan bagi Penyuluh KB itu diberikan.

Penyuluh KB sebagai individu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan program yang ada di lini lapangan ini perlu dilengkapi dengan adanya kemampuan, baik itu kemampuan mengenai kepemimpinan, manajerial, kompetensi teknis operasional, dan memiliki kompetensi dalam mengatasi permasalahan yang ada dilingkup masyarakat. Komptensi Penyuluh KB yang perlu dikembangkan, sebagaimana yang terdapat dalam manajemen Aperatur Sipil Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 69) terdiri atas 1. Kompetensi teknis, 2. Kompetensi manajerial, dan 3. Kompetensi sosial kultural.

Komptensi teknis ini menekankan pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Penyuluh KB dalam bentuk penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi manajerial menekankan pada tanggung jawab penyuluh KB dalam mengelola program sehingga dapat mencapai tujuan. Kompetensi sosial kultural ini menekankan pada bagaimana penyuluh KB dapat berkembang dalam lingkungan yang berubah(Suka, 2017).

Sehingga dapat ditarik bahwa dalam melaksanakan program Kampung KB ini dapat dicapai oleh seorang penyuluh KB yang memiliki kapasitas berwujud keterampilan, pengetahuan, dan ini didukung dengan sikap positif penyuluh KB dalam melaksanakan tugas ketika berada di lapangan. Adanya Penyuluh KB ini dirasa penting yang mana ini seiring dengan adanya ketetapan pemerintah untuk mengagendakan terkait pembangunan manusia seutuhnya sebagai program prioritas (Wijonarko, 2021). Untuk mengetahui mengenai *capacity building* individu yang diberikan kepada penyuluh KB yang nantinya akan dijelaskan secara mendalam dalam penelitian ini.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti jadikan referensi sekaligus menjadi pembandingan terhadap penelitian yang dilaksanakan:

Tabel I.4 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisa Kontribusi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	Agus Raikhani, Novy Setia Yunas, Linda Ratnasari, dan Iswari Hariastuti (2018)	Memiliki Topik pembahasan yang sama yaitu mengenai Program Kampung KB	Memilih lokasi penelitian yang berbeda, dan mengkaji mengenai kontribusi Kampung KB yang ada di Kota Jombang
2.	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana (studi pada Kampung KB RW 12 Sidotopo, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya)	Maulana Satria Aji (2019)	Memiliki Topik Pembahasan yang sama yaitu mengenai Kampung KB, dan lokasi penelitian juga menggunakan tempat yang sama dengan peneliti	Menggunakan teori implementasi pada program Kampung KB yang ada di kampung KB RW 12 Sidotopo, dan ranah penelitian pada lingkup Studi Kesehatan Masyarakat

3.	<i>Capacity Building</i> Instansi Puskesmas Dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Jagir Kota Surabaya	Akhmad Bagus Muqorrobin (2015)	Menggunakan teori yang sama yaitu menggunakan Teori <i>Capacity Building</i> .	Memiliki Studi penelitian yang berbeda yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Jagir Kota Surabaya
4.	Pemberdayaan Masyarakat “Kampung KB” ditinjau dari Perspektif Ottawa Charter	Maulana Satria Aji dan Gita Putra Heru Yudianto (2020)	Memiliki Topik pembahasan yang sama yaitu mengenai Program Kampung KB	Menggunakan teori yang berbeda yaitu pemberdayaan masyarakat dan juga menggunakan perspektif Ottawa Charter
5.	Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Hasriani, Rabina Yunus, Hamsinah (2021)	Memiliki Topik pembahasan yang sama yaitu mengenai Program Kampung KB	Menggunakan teori Implementasi pada penelitian yang dilakukan dan memiliki lokasi penelitian yang berada di Pangkajene dan Kepulauan
6.	Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Dalam Meningkatkan Hidup Masyarakat	Yuliana, Ipik Permana, dan Moh, Taufik Hidayat	Memiliki Topik pembahasan yang sama yaitu mengenai Program Kampung KB	Masih menggunakan teori evaluasi pada penelitian yang dilakukan, dan lokasi penelitian yang berada di Desa KedungJaya,

				Kabupaten Cirebon
7.	Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas	Andi Samsu Alam dan Ashar Prawitno (2015)	Menggunakan teori yang sama yaitu menggunakan Teori <i>Capacity Building</i> .	Memiliki Studi penelitian yang berbeda yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone.
8.	Capacity Building Organisasi	Mirawati (2019)	Menggunakan teori yang sama yaitu menggunakan Teori <i>Capacity Building</i> .	Memiliki Studi penelitian yang berbeda yang berada di Kelurahan Imopuro
9.	The Link Between Human Resource Capacity Building and Job Performance	Emmanuel Erastus Yamoah (2014)	Menggunakan teori yang sama yaitu menggunakan Teori <i>Capacity Building</i> .	Lebih meneliti mengenai hubungan antara Capacity Building dengan Performa kerja
10.	Measuring Capacity Building in Communities: a review of the literature	Selma C Liberato, Julie Brimblecombe, Jan Ritchie, Megan Ferguson, dan John Coveney (2011)	Menggunakan teori yang sama yaitu menggunakan Teori <i>Capacity Building</i> .	Lebih meneliti mengenai <i>capacity building</i> yang ada di masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan bahwa terdapat lima penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan yaitu mengenai Kampung KB, namun dalam penelitian ini membahas mengenai *capacity building* individu yang dilakukan bagi penyuluh KB dalam program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Surabaya. Terdapat lima penelitian lain yang sama-sama membahas mengenai *capacity building* individu. Namun dalam penelitian ini menggunakan studi deskriptif mengenai *capacity building* bagi penyuluh KB dalam program Kampung KB di Kota Surabaya di kawasan padat penduduk Surabaya. Sehingga berdasarkan

penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana *capacity building* individu bagi penyuluh KB dalam program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Surabaya.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana deskripsi *Capacity Building* bagi penyuluh Keluarga Berencana pada program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Surabaya?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan *Capacity Building* bagi penyuluh Keluarga Berencana pada program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Surabaya

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Akademis

Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan terkait rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam kajian Administrasi Publik terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan yang berfokus pada pengembangan kapasitas yang diterapkan bagi penyuluh program Keluarga Berencana. Secara Metodologis, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang memiliki fokus terkait pengembangan kapasitas.

I.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dengan menjadi sumber informasi kepada masyarakat terkait pengembangan kapasitas individu agar dapat digunakan sebagai rujukan bagi instansi atau organisasi dalam meningkatkan kinerja individu

I.5 Landasan Teori

Menurut KBBI (2022) teori merupakan pendapat yang didasarkan pada suatu penelitian dan juga penemuan yang didukung oleh adanya data dan argumentasi atau definisi lain menurut KBBI yaitu suatu penyelidikan eksperimental yang mana ini mampu menghasilkan sebuah fakta berdasarkan dari ilmu pasti, metodologi, logika, serta argumentasi. Menurut Jonathan H. Turner dalam buku Richard West (2008, hlm. 49) yang mengemukakan definisi teori sebagai sebuah proses dalam

mengembangkan ide-ide dengan tujuan untuk membantu dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa tersebut dapat terjadi. Terdapat juga definisi teori dari Kerlinger dan Fred (2002) yang mengemukakan bahwa teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang bertujuan untuk mengetahui fenomena secara sistematis dengan dilihat melalui hubungan antar variabel, sehingga dengan cara tersebut dapat berguna dalam menjelaskan dan meramalkan sebuah fenomena yang terjadi.

Landasan teori merupakan sebuah pedoman atau acuan yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini secara ilmiah. Penelitian ini akan membahas mengenai *capacity building* pada aspek individu. Serta menguraikan mengenai kendala apa yang dialami oleh DP3APPKB Kota Surabaya pada program Kampung Keluarga Berkualitas dengan menggunakan berbagai teori yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini. Susunan pada landasan teori pada penelitian ini yakni, *Capacity building* terutama mengenai *capacity building* individu. Konsep lain yang digunakan yaitu kependudukan dan juga kompetensi.

I.5.1 Kependudukan

I.5.1.1 Definisi Kependudukan

Kependudukan sendiri berawal dari kata dasar yaitu “penduduk” yang memiliki artian sebagai orang-orang yang mendiami suatu wilayah (kampung, pulau, negeri, dan sebagainya) (KBBI, 2022). Sedangkan Kependudukan dapat diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan umur, struktur, jeni kelamin, jumlah, kelahiran, agama, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta juga ketahanannya yang berkaitan dengan ekonomi, sosial. Budaya, dan politik.

Teori Kependudukan ini dibedakan menjadi tiga kelompok diantaranya sebagai berikut. Pertama, Definisi kependudukan menurut Thomas Robert Malthus dalam Edmund Conway (2015, hlm. 15) yang didefinisikan sebagai penduduk yang sama halnya dengan makhluk hidup lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mana apabila jika tidak ada pembatasan ini akan berakibat dengan mudahnya

penduduk untuk berkembang biak sehingga memenuhi beberapa bagian yang ada di bumi ini dengan cepat, yang mana pertumbuhan yang cepat ini tidak diseimbangi dengan laju pertumbuhan bahan makanan yang diperlukan oleh manusia agar tetap hidup. Hal tersebut akan berdampaknya pada menipisnya bahan makanan jika tidak adanya pembatasan pada pertumbuhan penduduk. Terkait definisi tersebut dapat ditarik bahwa kependudukan sebuah kondisi peningkatan jumlah penduduk yang tidak diseimbangi dengan jumlah peningkatan makanan yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan.

Kedua, Definisi kependudukan yang dijelaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Lucky Radita Alma (2019, hlm. 13) yang memiliki pengertian berbeda dengan definisi sebelumnya yaitu pertumbuhan penduduk yang disebabkan karena adanya tekanan pada kesempatan kerja. Terkait definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang ada ini menyebabkan adanya tekanan pada kesempatan kerja, yang mana pertumbuhan penduduk yang ada tidak diseimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Ketiga, Definisi kependudukan yang disampaikan oleh John Stuart Mill dalam Lucky Radita Alma (2019, hlm. 14) yang memberikan pernyataan bahwa tinggi rendahnya pada tingkat kelahiran ini ditentukan pada manusia itu sendiri, maka dari itu John Stuart Mill memberikan saran untuk lebih meningkatkan pada golongan yang tidak mampu. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik bahwa tingkat kelahiran yang ada ini sebenarnya tidak meningkat sendirinya begitu saja melainkan manusia itu sendiri yang dapat menentukan tingkat kelahiran yang ada di lingkungannya. Jika memang daerah tersebut kekurangan bahan makanan maka dapat diselesaikan dengan melakukan import pada bahan makanan yang mengalami kekurangan tersebut.

Definisi lain yang disampaikan oleh Emile Durkheim dalam Lucky Radita Alma (2019, hlm. 15) yang berpendapat bahwa Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk yang mana ini akan timbul persaingan antara manusianya dengan tujuan untuk mempertahankan hidup. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepadatan penduduk ini secara

tidak langsung akan mendorong manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya agar dapat bertahan hidup.

I.5.2 Program Kampung Keluarga Berkualitas

Definisi program ialah sebuah pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa tujuan yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain untuk mencapai target sasaran yang sama. Suatu program biasanya mencakup seluruh kegiatan yang mana berada dibawah unit administrasi yang sama, atau memiliki sasaran-sasaran yang saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi, yang mana ini semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan juga secara berurutan (Muhaimin dkk., 2010, hlm. 349).

Program juga dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan kegiatan untuk menjalankan sebuah misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mana capain target tersebut telah ditetapkan pada kurun waktu tiap tahun yang akan menguraikan lebih lanjut mengenai suatu rencana kinerja (*performance plan*) dan juga merupakan kedalam bagian integral pada proses perencanaan yang strategis dan menjadi dasar yang kuat dalam mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja sehingga lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana yang jangka panjang dan bersifat menyeluruh.

I.5.2.1 Kampung Keluarga Berkualitas

Definisi Keluarga Berencana menurut Undang-undang nomor 52 tahun 2009 merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Undang-Undang No. 52 Tahun 2009). Salah satu aktualisasi Undang-undang tersebut yang khususnya dalam pembangunan keluarga melalui program Kampung KB yang merupakan penguatan pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang mana ini dilakukan dengan melakukan penyusunan kegiatan dengan memperkuat pencapaian target secara langsung dan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program yang dibentuk dan dikelola oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pada tanggal 14 Januari 2016 melalui penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang berfokus tidak hanya pada penanganan masalah pengendalian penduduk namun juga mencakup beberapa bidang lainnya seperti bidang perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya (Vicki Sabilla & Purnaningsih, 2020). Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan total Program KB sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas (BKKBN, 2015).

Kampung Keluarga Berencana telah mengalami perubahan nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) No. 834.4/2879/SJ Tahun 2020 mengenai Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas. Perubahan ini dilakukan karena Kampung KB dipandang hanya berada di naungan BKKBN dan segala hal yang terkait dengan Keluarga Berencana (KB), padahal di dalam Kampung KB ini merangkul segala macam sektor baik itu dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan. Kampung Keluarga Berkualitas memiliki definisi yang tidak berbeda dengan sebelumnya yang mana sebagai suatu satuan wilayah setingkat desa yang mana terdapat adanya integrasi antara penyelenggaraan pemberdayaan dengan penguatan institusi keluarga yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan, keluarga, dan juga masyarakat.

Kampung Keluarga Berkualitas merupakan sebuah satuan wilayah yang berada pada tingkat desa yang mana ini terintegrasi dengan penyelenggaraan pemberdayaan dan juga penguatan intuisi keluarga terkait seluruh dimensinya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mana didalamnya termasuk kedalam keluarga dan masyarakat. Didalam Kampung KB ini

terdapat adanya pendekatan pembangunan yang memiliki sifat universal, dan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mana didalamnya termasuk mengenai pengoptimalan pada penyelenggaraan pemberdayaan pada penguatan intuisi keluarga, sehingga perlu adanya dorongan pada pelaksanaan Kampung KB ini di setiap kelurahan atau desa.

I.5.3 Penyuluh Keluarga Berencana

Kata penyuluh sendiri berasal dari kata dasar yaitu suluh dan unuk definisi penyuluh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2022) ialah pemberi penerangan atau penunjuk jalan. Atau jika dijabarkan sebagai seseorang yang memberikan arahan kepada individu ataupun organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan arahan dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Penyuluh Keluarga Berencana menurut Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2018 Pasal Ayat 4 yang berbunyi “Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut sebagai Penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pergerakan, dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga” berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Keluarga Berencana merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional sehingga hak dan wewenang yang diperoleh itu sama dengan PNS lainnya.

I.5.4 Kompetensi Penyuluh

I.5.4.1 Definisi Kompetensi

Secara harfiah kata kompetensi sendiri berasal dari kata *competence* yang memiliki arti sebagai kemampuan, kecakapan, dan wewenang yang dijelaskan oleh Scale (1975) dalam Sutrisno (2009). Secara etimologi maksud dari kata kompetensi adalah sebuah dimensi mengenai keahlian atau keunggulan seorang

pemimpin ataupun juga anggota yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan berperilaku baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Pasal 13, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas dan jabatannya.

Menurut Spencer and Spencer (1993) dalam Sutrisno (2009) kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari individu dan berkaitan dengan adanya efektivitas kinerja dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik bahwa kompetensi ini sudah menjadi bagian dari kepribadian dalam dari tiap manusia dan juga perilaku yang dapat diprediksi di berbagai situasi dan dalam melaksanakan pekerjaan.

Menurut Boulter, Dalziel, dan Hill (2003) dalam Sutrisno (2009) kompetensi sebagai salah satu karakteristik dasar pada tiap individu yang memungkinkan tiap individu ini memberikan kinerja yang unggul dalam peran, pekerjaan, atau situasi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik artian bahwa kompetensi sudah menjadi hal yang mendasar yang dimiliki oleh tiap orang yang mana ini memungkinkan kompetensi tersebut bermanfaat untuk mereka baik itu untuk melakukan pekerjaannya atau melakukan peranan lainnya.

Menurut Mulyasa (2003) dalam Sutrisno (2009) mendefinisikan kompetensi sebagai sebuah perpaduan antara keterampilan, pengetahuan, nilai, dan sikap yang diterapkan dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan sebuah kombinasi dari pengetahuan, nilai, dan sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam berpikir maupun bertindak.

Menurut McAshan (1981) dalam Sutrisno (2009) yang mengartikan kompetensi sebagai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dikuasai oleh individu dan telah menjadi bagian dari individu tersebut, sehingga individu tersebut dapat menerapkan perilaku-perilaku efektif, kognitif, dan juga

psikomotorik dengan baik. Dari definisi berikut dapat diartikan bahwa kemampuan yang telah dikuasai dan menjadi bagian dari dirinya ini akan membuat individu akan memiliki perilaku yang senantiasa akan baik juga.

Finch dan Crunkilton (1979) dalam Sutrisno (2009) memberikan penjelasan mengenai kompetensi sebagai penguasaan yang dimiliki individu terhadap suatu tugas, sikap, ketrampilan, dan juga apresiasi diperlukan agar menunjang keberhasilan tugas tersebut. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa penting adanya penguasaan terhadap tugas, ketrampilan, sikap, dan juga apresiasi yang mana ini akan menunjang individu tersebut untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan.

I.5.4.2 Aspek-Aspek Kompetensi

Menurut Gordon (1988) dalam Sutrisno (2009) yang menjelaskan mengenai aspek-aspek yang ada dalam konsep kompetensi sebagai berikut.

- a. Pengetahuan, ialah kesadaran dalam bidang kognitif yang mana nantinya individu ini mengetahui cara untuk mengidentifikasi cara belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik serta sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pemahaman, ialah memiliki kedalaman pada kognitif dan afektif pada individu, sehingga nantinya ketika individu melakukan sebuah pembelajaran tentu perlu memiliki pemahaman mengenai karakteristik dan kondisi kerja yang efektif dan juga efisien.
- c. Kemampuan, ialah sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas yang berikan kepadanya. Hal ini diperlukan agar pekerjaan yang ada dalam perusahaan atau institusi dapat berjalan seperti yang telah direncanakan.
- d. Sikap, ialah sebuah perasaan atau reaksi seorang individu terhadap rangsangan yang berasal dari luar. Hal ini diperlukan agar individu dapat memberikan tanggapan terkait hal apapun yang berasal dari luar

- e. Minat, ialah sebuah kecenderungan yang dimiliki oleh seorang individu dalam melakukan sesuatu. Hal ini yang mendorong agar individu antusias dalam melakukan yang dikerjakannya dan akan berpengaruh pada hasil yang diberikan oleh individu tersebut.

I.5.4.3 Karakteristik Kompetensi

Dalam kompetensi terdapat lima karakteristik yang terkandung di dalamnya hal ini dijelaskan oleh Spencer *and* Spencer (1993) dalam Edy Sutrisno (2009), yaitu:

- a. *Motives*, ialah suatu keadaan dimana seorang individu ini secara konsisten berpikir sehingga individu yakin untuk melakukan sebuah tindakan selanjutnya. Konsisten adalah inti dari karakteristik ini yang secara tidak langsung akan mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi tantangan pada individu tersebut.
- b. *Traits*, ialah watak yang menjadikan individu untuk berperilaku dalam merespon sesuatu dengan cara tertentu. Salah satu contoh dalam karakteristik ini ialah seorang individu yang percaya diri dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi selanjutnya.
- c. *Self Concept*, ialah sebuah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap individu, yang mana sikap dan nilai-nilai tersebut dapat diukur dengan melakukan tes kepada responden yang ditujukan untuk dapat mengetahui nilai yang dimiliki tiap individu dan apa yang menarik bagi individu melakukan sesuatu.
- d. *Knowledge*, ialah sebuah informasi yang dimiliki individu dalam bidang tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai kompetensi yang kompleks. Karakteristik ini tentunya tidak hanya dapat diukur dengan melakukan tes pengetahuan saja, karena dalam tes pengetahuan mengharuskan individu untuk mencari jawaban yang benar, namun tidak bisa diukur apakah individu tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya.

- e. *Skills*, ialah kemampuan dalam melakukan suatu tugas baik itu berhubungan dengan fisik maupun mental. Kemampuan tiap individu tentunya berbeda sesuai dengan bidang yang dipelajari dan dikuasainya/

I.5.4.4 Manfaat Kompetensi

Kompetensi menjadi sangat populer dan seringkali digunakan untuk melakukan rekrutmen dan seleksi dan sistem remunerasi hal ini yang menjadikan konsep kompetensi sering digunakan oleh perusahaan dan lembaga dengan berbagai alasan hal ini akan dijelaskan oleh Ruky (2003) dalam Sutrisno (2009) sebagai berikut.

- a. Memperjelas mengenai standar kerja dan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau institusi. Standar kerja yang dimaksud mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan karakteristik apa saja yang diperlukan oleh perusahaan atau institusi.
- b. Alat seleksi karyawan, penggunaan kompetensi ini tentu saja sebagai sarana mempermudah dalam menyeleksi karyawan agar dapat memperoleh yang dengan tujuan perusahaan atau institusi.
- c. Memaksimalkan produktivitas, dengan hasil seleksi yang telah dilakukan tentunya menghasilkan tenaga-tenaga yang segar untuk dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dari perusahaan.
- d. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi, dengan adanya konsep kompetensi dapat memudahkan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu sehingga mudah untuk menentukan remunerasi yang sesuai dengan kinerjanya.
- e. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan, dengan adanya kompetensi ini memberikan sarana untuk dapat menerapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus menerus mengalami perubahan.

- f. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi, dengan adanya kompetensi ini akan memudahkan dalam mengomunikasikan mengenai nilai-nilai apa saja yang perlu dijadikan fokus kedepannya.

I.5.6 Capacity Building

I.5.5.1 Definisi Capacity Building

Menurut Milen dalam Haryono (2012, hlm. 141) yang mengemukakan definisi tentang kapasitas yaitu sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk dapat menjalankan fungsi secara efektif dan efisien serta dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya menurut UNDP (*United Nations Development Program*) (2009) yang mendefinisikan peningkatan kapasitas sebagai sebuah proses dimana individu, kelompok (organisasi, institusi, atau masyarakat) dalam meningkatkan kemampuan agar dapat menghasilkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat memecahkan permasalahan, merumuskan hingga merealisasikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Nugraha (2004) *capacity building* merupakan pengembangan kapasitas yang mengarah pada proses yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan baik itu secara individual maupun secara kelompok dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi, menuntaskan permasalahan, serta menctimapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara mandiri.

Definisi *Capacity Building* menurut Merilee S. Grindle (1997) yang dikutip oleh Riyadi Soeprapto (2006) yang menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas itu adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap dari kinerja pemerintah. Efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Efektivitas yang dimaksud ialah sebuah kepantasan dari usaha yang dilakukan demi hasil yang diharapkan. Sedangkan daya tanggap merupakan sebuah upaya bagaimana

menghubungkan antara kebutuhan dengan kemampuan untuk untuk maksud tersebut.

Definisi *Capacity Building* menurut Brown (2001) yang dikutip oleh Bambang Irawan (2016, hlm. 9) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan baik itu individu, kelompok, dan organisasi atau sistem yang ditujukan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk memperoleh hasil yang baik. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *capacity building* ialah sebuah proses kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang memuaskan baik itu yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi atau sistem.

Definisi *capacity building* menurut Morison (2001) yang dikutip oleh Bambang Irawan (2016, hlm. 9) ialah sebuah proses atau dengan kata lain sebuah serangkaian aktivitas dalam rangka untuk melakukan sesuatu perubahan yang baik kedepannya pada level individu, kelompok, maupun organisasi dan sistem dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan yang dimiliki oleh individu dan organisasi dalam melakukan penyesuaian sehingga dapat cepat dalam mengikuti perubahan lingkungan yang ada. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya *capacity building* ini untuk memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya baik itu untuk individu, kelompok, dan organisasi sehingga dapat tanggap dalam melakukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Definisi lain yang memiliki makna yang sama dari sebelumnya oleh Banyan (2007) yang dikutip oleh Bambang Irawan (2016, hlm. 9) yang mendefinisikan *capacity building* sebagai sekumpulan kegiatan yang mana pihak pribadi (individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat) yang melakukan pengembangan kemampuan dengan tujuan dapat berjalan secara efektif dalam pemerintahan. Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa *capacity building* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat dengan tujuan untuk dapat bekerja secara efektif dalam lingkup pemerintahan.

Selanjutnya menurut Valentine Udoh James (1998) yang dikutip oleh Riyadi Soeprapto (2006) yang mengemukakan bahwa *capacity building* merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang ada di negara sedang berkembang untuk mengembangkan pada sisi keterampilan manajemen dan kebijakan yang mendasar yang dibutuhkan dalam membangun sosial politik, ekonomi, serta sumber daya manusia sehingga dapat eksis dalam peraturan global yang ada saat ini.

Selain itu definisi *capacity building* menurut Sension dalam Haryono (2012, hlm. 39) yang mengemukakan definisinya yakni, pengembangan kapasitas secara umum dapat dipahami sebagai upaya dalam membantu masyarakat, pemerintah, ataupun individu dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, dimana program peningkatan kapasitas ini seringkali dirancang untuk digunakan sebuah sarana dalam memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi mengenai pilihan kebijakan serta dalam menjalankan keputusan yang diambil secara efektif.

I.5.5.2 Tingkatan Capacity Building

Capacity building dalam pelaksanaannya terdapat tiga dimensi menurut *United National Building Development* (UNDP) yakni:

- a. Dimensi *Human resource* (tenaga kerja), merupakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan bagaimana cara memanfaatkan potensi dari SDM tersebut.
- b. Dimensi fisik atau modal, yaitu menyangkut hal terkait sarana fisik itu material, bahan-bahan, atau peralatan yang diperlukan untuk mempermudah mencapai tujuan yang telah direncanakan.
- c. Teknologi, yaitu suatu upaya yaitu berupa teknologi dalam membantu organisasi pada gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentu

kebijakan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen di organisasi tersebut.

Selanjutnya berbicara terkait *capacity* ini dapat digolongkan kedalam tiga tingkatan menurut Riyadi Soeprapto (2006) yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat individual, seperti diperlukannya keterampilan, tingkah laku, pengetahuan, pengelompokan pekerjaan serta motivasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi tersebut.
- b. Tingkat institusional, seperti pada struktur organisasi yang mana proses pengambilan keputusan didalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, adanya pengaturan terkait sarana dan prasarana, serta adanya jaringan organisasi.
- c. Tingkatan sistem, seperti adanya kerangka kerja yang saling berhubungan dengan pengaturan dan kebijakan serta kondisi dasar yang saling mendukung pada penerapan objek kebijakan tertentu.

Selanjutnya terdapat tiga tingkatan pada *capacity building* yang harus dilaksanakan secara efektif dan juga saling memiliki kesinambungan antara satu sama lain, menurut Leavit yang digolongkan kedalam beberapa tingkatan berikut:

- a. Tingkat individu, yang didalamnya terdiri dari keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan etika.
- b. Tingkat kelembagaan, meliputi sumber daya, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengambilan keputusan yang ada di lembaga tersebut.
- c. Tingkat sistem yang didalamnya terdapat peraturan perundang-undangan, dan adanya kebijakan pendukung.

Selanjutnya adalah tingkatan pada proses pengembangan kapasitas menurut Brown (2001) sebagai berikut:

- a. Tingkat Sistem, pada tingkatan ini mencakup pada kumpulan dari suatu organisasi yang mana didalamnya ini terdapat sumber daya, pelaku, dan

lembaga yang memiliki hubungan dengan pembiayaan, regulasi, dan pelaksanaan, Pengembangan kapasitas yang ada pada tingkatan ini memiliki *output* pada rancangan struktur dan kebijakan pada suatu organisasi.

- b. Tingkat Organisasi, tingkat ini berfokus pada struktur, proses, dan sistem manajemen yang mana ini meliputi sumber daya manusia dan pengetahuan dalam organisasi dalam melakukan transformasi sumber daya tersebut menjadi sebuah layanan, *Pengembangan* kapasitas pada tingkat ini mencakup perencanaan strategis, pengembangan sumber daya manusia, dan jaringan komunikasi
- c. Tingkat Individu, pada tingkatan ini menekankan kepada pengembangan kapasitas yang dilakukan secara individu dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Semakin baik individu didalam suatu organisasi, maka individu ini akan dapat mempengaruhi kinerja organisasinya.

I.5.5.3 Capacity Building Individu

Capacity Building dalam perspektif Sumber Daya Manusia yaitu mengacu pada komunitas lokal yaitu pada level kompetensi, kemampuan, dan keahlian individu untuk mengimplementasikan berbagai macam fungsi yang ada, serta mengelola keadaan dan memecahkan permasalahan secara bersama-sama atau mencari tujuan yang ingin dicapai (Noho, 2014, hlm. 10). Berhubungan dengan penjelasan terkait *capacity building* SDM, Grindle mengemukakan bahwa “inisiatif untuk melakukan pengembangan pada SDM yang secara umum ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kapasitas dari individu dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara profesional.

I.5.5.3.1 Urgensi Capacity Building Individu

Dalam Siagian (2002), adanya tuntutan yang kuat untuk melakukan adanya *capacity building* pada individu ini dikarenakan adanya beberapa urgensi, diantaranya sebagai berikut.

- a. Pengetahuan individu yang perlu adanya pembaharuan, maksud dari adanya urgensi ini ialah dengan adanya perubahan yang semakin cepat dari hari kehari sehingga secara tidak langsung memaksa setiap individu melakukan pembaharuan terutama pada pengetahuan individu tersebut.
- b. Dalam masyarakat selalu terjadi adanya perubahan, maksud dari adanya poin ini berkesinambungan dengan penjelasan sebelumnya yang mana menyebutkan mengenai perubahan yang cepat terutama dilingkup masyarakat itu sendiri sehingga mengharuskan tiap individu untuk siap menerima perubahan dan selalu melakukan pembaharuan.
- c. Persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan, maksud dari poin ini ialah dengan adanya kemampuan yang dimiliki tentunya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan baik itu yang memiliki kemampuan yang rendah maupun tinggi.
- d. Adanya kemungkinan terkait perpindahan pegawai, maksud dari poin ini ialah dengan adanya beragam lapangan kerja tentunya menjadi kewenangan dari pegawai tersebut untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kompetensi yang dipelajari.

I.5.5.3.2 Tujuan dan Manfaat Capacity Building Individu

Grindle memberikan penjelasan bahwa tujuan adanya *capacity building* individu adalah untuk menciptakan individu menjadi tenaga teknis dan menjadi tenaga profesional. Sedangkan menurut Siagian (2002) dalam *capacity building*

individu tidak hanya memiliki tujuan namun juga memiliki manfaat. Manfaat dari adanya *capacity building* individu menurut Siagian, yakni:

- a. Meningkatkan kemampuan adalah solusi untuk menyelesaikan masalah, pada poin ini memiliki arti yaitu ketika dalam suatu permasalahan biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga untuk mencegah hal tersebut perlu untuk meningkatkan kemampuan bagi Individu agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi kedepannya.
- b. Terjadi internalisasi dan operasionalisasi pada faktor motivasional, pada poin menjelaskan mengenai pentingnya untuk melakukan motivasi di dalam internalisasi dan juga operasionalisasi agar memberikan hasil terbaik pada bidang yang dikerjakan.
- c. Adanya dorongan dalam diri untuk tetap terus meningkatkan kemampuan kinerja, pada poin ini berkesinambungan dengan poin pertama yang mana perlu adanya dorongan dari individu itu sendiri untuk meningkatkan kerja sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dan akan dihadapi.
- d. Membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan tepat, dengan adanya ketiga poin tersebut ini dapat membantu bagi individu untuk cepat dalam membuat keputusan dengan hasil yang baik dan tepat.

I.5.5.3.3 Aspek Capacity Building Individu

Aspek *capacity building* individu menurut Riyadi Soeprapto (2006) yang lebih berfokus pada aspek tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, motivasi dan pengelompokkan kerja. Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Leavait, yang menekankan aspek *capacity building* individu ini pada keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan etika.

Lebih jelas lagi, aspek-aspek *capacity building* individu menurut Kamariah (2012) bisa menggunakan kompetensi. Didalam kompetensi ini terdapat indikator-indikator yang lebih dalam, yaitu:

- a. *Knowledge*, yang meliputi pengetahuan teknis, pengetahuan kerja, pengetahuan umum, dan kesadaran diri.
- b. *Ability*, yang meliputi organisasi, perencanaan, pelaksanaan, kerjasama, mengatasi konflik, pengambilan keputusan, pemikiran intuitif, komunikasi, dan evaluasi
- c. *Interest*, yang meliputi tanggung jawab, percaya diri, sikap, norma dan etika.(Noho, 2014)

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai capacity building bagi penyuluh program kampung keluarga berkualitas di kota Surabaya, sehingga indikator yang relevan digunakan dalam melakukan penelitian yaitu pengetahuan, keterampilan, dan motivasi

- a. Pengetahuan, menurut Bergeron dalam Sangkala (2007) pengetahuan merupakan sebuah informasi yang telah di organisasi, diringkaskan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Dalam pengetahuan menurut Lilik (2007) terdapat dua dimensi yang terdiri dari dimensi epistemologis dan dimensi ontologis.

1. Dimensi Epistemologis

Dimensi ini merupakan sebuah dimensi yang membahas mengenai bagaimana cara memperoleh suatu pengetahuan yang mana cara tersebut terbagi atas dua pendekatan, yaitu

- *Tacit knowledge*, yang berarti pengetahuan dari dalam individu tersebut yang mana biasanya ini berasal dari pengalaman, dan praktis. Atau dapat dengan penjelasan sederhana *Tacit Knowledge* diartikan sebagai pengetahuan informal.

- Explicit *knowledge*, yang berarti pengetahuan yang bersangkutan dengan rasionalisasi atau bisa dibilang pengetahuan yang diperoleh dalam pengetahuan informal seperti sekolah ataupun perkuliahan pada umumnya.

2. Dimensi Ontologis

Dimensi ini membahas mengenai adanya tingkatan pada pengetahuan yang dimulai dari individu, organisasi, lalu dilanjutkan dengan antara organisasi. Karena individu sendiri merupakan kunci dari kesuksesan sebuah organisasi (Sangkala, 2007)

- b. Keterampilan, menurut Dale (2003) keterampilan didefinisikan sebagai sebuah perilaku menunjukkan akan kemampuan seorang individu dalam melakukan sebuah tugas baik itu dalam bentuk fisik maupun mental tertentu yang dapat dilakukan observasi. Atau lebih sederhananya keterampilan ialah sebuah perilaku yang terkait dengan tugas yang dikuasai dengan melalui adanya pembelajaran dan hal tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya latihan dan bantuan dari orang lain.

Keterampilan menurut Ubaedi (2008) sendiri dibagi akan dua bagian diantaranya *soft skills* dan *hard skills*. *Soft Skills* ialah sebuah kemampuan seorang dalam memberdayakan diri, dengan meliputi hubungan yang bermanfaat dengan orang lain. Sedangkan *hard skills* ialah sebuah kemampuan mengenai pekerjaan-pekerjaan teknis dan juga kemampuan akademik.

- c. Motivasi, menurut Hasibuan (1992) yang mendefinisikan motivasi sebagai pendorong untuk menciptakan kegairahan dan semangat dalam bekerja dengan tujuan agar individu tersebut dapat bekerja secara efektif, bekerja sama, dan saling terintegrasi antar satu sama lain untuk mencapai kepuasan. Menurut terdapat 5 tingkatan dalam kebutuhan diantaranya sebagai berikut.

1. Kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan pada tingkat dasar karena mencakup akan kebutuhan sehari-hari dari seorang individu seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain-lain
2. Kebutuhan rasa aman, merupakan kebutuhan yang mencakup mengenai keamanan individu dari adanya bahaya kecelakaan kerja, dan adanya jaminan untuk hari tua.
3. Kebutuhan sosial, merupakan kebutuhan yang mencakup mengenai hubungan yang dimiliki seorang individu seperti persahabatan dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain.
4. Kebutuhan penghargaan, merupakan kebutuhan yang mencakup akan prestasi, status, kekuasaan, dan sebagainya
5. Kebutuhan aktualisasi, merupakan kebutuhan yang berada pada tingkat tertinggi yang mencakup akan dihargai atas prestasi yang dimiliki, adanya pengakuan atas kemampuan yang dimiliki, dan keahlian seorang individu.

I.5.6 Hubungan *Capacity Building* Dengan Kompetensi Penyuluh

Hubungan antara *capacity building* dengan kompetensi penyuluh, dimana kompetensi penyuluh merupakan sebuah perpaduan antara keterampilan, pengetahuan, nilai, dan sikap yang diterapkan dalam kebiasaan berpikir dan juga bertindak. Kompetensi merupakan sebuah kombinasi dari pengetahuan, nilai, dan sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam berpikir maupun bertindak. Dalam kompetensi sendiri pengetahuan merupakan salah satu aspek yang penting dan perlu dimiliki oleh seorang individu. Sedangkan *capacity building* individu merupakan pengembangan kapasitas yang dilakukan secara individu dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Semakin baik individu didalam suatu organisasi, maka individu ini akan dapat mempengaruhi kinerja organisasinya

Sehingga relevansi antara keduanya yang dapat dilihat bahwasanya dalam *capacity building* individu ini memiliki urgensi untuk meningkatkan pengetahuan individu dengan melakukan adanya pembaharuan. Yang mana pada salah satu

aspek kompetensi ini diperlukan adanya pengetahuan. Sehingga dapat ditarik keduanya sama-sama memerlukan adanya pengetahuan untuk melakukan *capacity building* pada individu dan apabila seorang penyuluh memiliki pengetahuan yang baik akan berdampak pada peningkatan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam memahami penanganan masalah pengendalian penduduk namun juga mencakup beberapa bidang lainnya seperti bidang perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, untuk melakukan *capacity building* individu ini memiliki hubungan erat dengan adanya kompetensi dari penyuluh agar mengerti apa yang akan dikerjakan sehingga dapat sampai kepada masyarakat. Jika kompetensi dari penyuluh itu tidak mencukupi ini akan berpengaruh pada *output* yang diberikan oleh penyuluh tersebut. Maka perlu adanya *capacity building* individu yang dilakukan jika dirasa kompetensi yang dimiliki oleh seorang penyuluh dirasa kurang maksimal sehingga menjadi lebih baik lagi.

1.6 Definisi Konsep

Konsep adalah sebuah istilah yang mendefinisikan secara abstrak suatu, keadaan, kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian pada ilmu sosial. Konsep ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah penelitian yang mana ini berisi mengenai ide-ide yang disalurkan kedalam satu acuan dengan menggunakan satu istilah dalam menanggapi suatu fenomena yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian. Meskipun fenomena yang diteliti adalah fenomena yang sama namun pasti setiap orang memiliki cara berbeda dalam mendefinisikan kedalam konsepnya, yang mana hal tersebut tergantung dengan faktor-faktor penyebab dalam fenomena tersebut. Maka dari itu menurut peneliti, konsep yang perlu didefinisikan, yakni:

- a. Kependudukan, adalah sebuah kondisi peningkatan jumlah penduduk yang tidak diseimbangi dengan jumlah peningkatan makanan yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan.

- b. Program merupakan sebuah rumusan atau rancangan kegiatan yang dibuat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
- c. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan upaya yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka melakukan pengendalian penduduk dan juga berfokus beberapa bidang lainnya seperti bidang perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya
- d. Penyuluh Keluarga Berencana merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (PPKBPK)
- e. Kompetensi, ialah sebuah kombinasi dari pengetahuan, nilai, dan sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam berpikir maupun bertindak.
- f. *Capacity Building* adalah pengembangan yang dilakukan terhadap individu ataupun kelompok yang mengarah pada proses yang mana ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan kemampuan yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- g. *Capacity Building* Individu merupakan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan secara individu yang mana ini digunakan untuk dapat melaksanakan berbagai macam fungsi yang diberikan, dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mencapai kata efisien dan efektivitas.

I.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan untuk mengungkap kebenaran secara ilmiah dari adanya fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Maksud dari cara ilmiah tersebut ialah kegiatan penelitian yang bersandar pada ciri-ciri akan keilmuan seperti rasional, empiris, dan sistematis.

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2017, hlm. 15) metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang dilandasi dengan filsafat postpositivisme yang mana ini digunakan dengan tujuan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah. Pada penelitian ini peneliti menjadi instrumen kunci, serta dalam pengambilan sampel data ini dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi dan dalam analisis data bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil dari penelitian kualitatif ini menekankan pada “makna” dari pada “generalisasi”.

Menurut Creswell (2014) metode penelitian kualitatif ini merupakan sebuah rancangan yang berfokus pada pengumpulan data, analisis data, dan laporan penelitian, tetapi tetap berpatokan pada berbagai disiplin dan terus berkembang secara dinamis sepanjang proses penelitian seperti jenis permasalahan, masalah etis, dan lain-lain.

Terkait dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini dilihat dari rumusan masalah dan tujuan, metode penelitian yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini ingin memberikan pemaknaan atau pemahaman secara mendalam dari masalah yang diteliti yaitu *capacity building* Bagi Penyuluh Keluarga Berencana Pada Program Kampung KB Keluarga Berkualitas Di Kota Surabaya.

I.7.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang diarahkan dengan tujuan untuk memberikan fakta-fakta secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat pada populasi atau daerah tertentu. Diperkuat dengan penjelasan dari Neuman yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ini dimulai dari rumusan masalah yang selanjutnya disampaikan berupa gambaran secara spesifik dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam. Ini sesuai dengan tujuan penelitian pada penelitian ini yang ingin mendeskripsikan Capacity Building Bagi Penyuluh

Keluarga Berencana Pada Program Kampung KB Keluarga Berkualitas Di Kota Surabaya.

I.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan paparan yang menyangkut dengan identifikasi pada karakteristik lokasi, dan terdapat juga alasan dalam memilih lokasi, serta cara peneliti dalam memasuki lokasi tersebut. Maka dari itu penelitian ini menggunakan lima lokasi penelitian Kampung KB yang masing-masing mewakili tiap wilayah di Surabaya.

Untuk wilayah Surabaya Utara peneliti memilih pada Kampung KB yang berlokasi di RW 12, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Alasan peneliti memilih Kampung KB di RW 12 ini karena wilayah ini merupakan Kampung KB pertama di Surabaya yang mana ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Surabaya pada saat itu yaitu Ibu Tri Rismaharini dan termasuk kedalam kecamatan yang memiliki penduduk tertinggi dari kelima Kecamatan yang ada di wilayah Surabaya Utara.

Untuk wilayah Surabaya Selatan peneliti memilih pada Kampung KB “Kupuja Wani Berubah” yang berlokasi di RW 7, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Alasan peneliti memilih Kampung KB “Kupuja Wani Berubah” ini karena di wilayah ini termasuk salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dari delapan Kecamatan yang ada di Surabaya Selatan.

Untuk wilayah Surabaya Pusat peneliti memilih pada Kampung KB “Guyub Kertoharjo” yang berlokasi di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Alasan peneliti memilih Kampung KB “Guyub Kertoharjo” ini karena di wilayah ini termasuk kedalam Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dari empat Kecamatan lain yang ada di Surabaya Pusat.

Untuk wilayah Surabaya Timur peneliti memilih pada Kampung KB “Wr Soepratman” yang berlokasi di Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Alasan peneliti memilih Kampung KB “Wr Soepratman” ini karena di wilayah ini termasuk kedalam Kecamatan yang memiliki

jumlah penduduk tertinggi dari tujuh Kecamatan yang ada di wilayah Surabaya Timur.

Untuk wilayah Surabaya Barat peneliti memilih pada Kampung KB “Simbar Jaya” yang berlokasi di Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Alasan peneliti memilih Kampung KB Simbar Jaya sebagai tempat penelitian karena di wilayah ini termasuk salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dari tujuh Kecamatan yang ada di Wilayah Surabaya Barat.

Untuk meneliti mendalam mengenai penyuluh Kampung KB, peneliti memilih melakukan penelitian di kantor DP3APPKB Surabaya untuk memperoleh lebih dalam mengenai Kampung KB terutama *capacity building* individu yang ada pada Penyuluh KB tersebut.

Berdasarkan alasan peneliti memilih lokasi tersebut, berikut ini adalah lokasi yang dijadikan sebagai penelitian:

- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Jalan Kedungsari No 18, Wonorejo, Tegalsari, Kedungdoro, Kec Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60263.
- b. Kampung KB RW 12, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur 60153.
- c. Kampung KB “Kupuja Wani Berubah” RW 7, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa timur 60255.
- d. Kampung KB “Guyub Kertoharjo” Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60171
- e. Kampung KB “Wr Soepratman”, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60137
- f. Kampung KB “Simbar Jaya”, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60281

I.7.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam Penelitian ini, diperlukannya berbagai data dan juga informasi yang harus didapatkan dari pihak-pihak yang sesuai untuk memperlancar penelitian ini. Pada penelitian Kualitatif, teknik penentuan informan ini merupakan salah satu hal yang penting. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* karena bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperoleh dari informan kunci. Sebelum menentukan informan kunci perlu adanya penghimpunan awal yang meliputi variasi antar sub-sub unit serta informan yang dipilih ini merupakan informan yang memiliki banyak akan pengetahuan dan kaya akan informasi terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Ini dipertegas dengan penjelasan menurut Sugiyono (2017, hlm. 300) mengenai *purposive* yang merupakan teknik penentuan informan yang dipilih dengan mempertimbangkan informan tersebut dianggap yang paling menguasai mengenai objek atau situasi yang diteliti. Berdasarkan penjelasan ini peneliti telah memiliki rencana informan yang dipilih sebagai berikut:

1. Bapak Gita Heru Yudianto selaku Sub Koordinator Keluarga Berencana. Peneliti memilih informan ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai Kampung KB terutama pada *capacity building* individu yang dilakukan pada penyuluh KB.
2. Ibu Dra. Diah Sonowati selaku Ketua Koordinator penyuluh KB Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur 60153. Peneliti memilih informan ini dikarenakan untuk mengetahui *capacity building* individu yang ada pada penyuluh KB,
3. Bapak Iswandi selaku Ketua Koordinator penyuluh Kampung KB “Kupuja Wani Berubah” Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa timur 60255. Peneliti memilih informan ini dikarenakan untuk mengetahui *capacity building* individu yang ada pada penyuluh KB.
4. Ibu Dra. Emi Saraswati selaku Ketua Koordinator penyuluh Kampung KB “Guyub Kertoharjo” Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60171. Peneliti memilih informan ini dikarenakan untuk mengetahui *capacity building* individu yang ada pada penyuluh KB.

5. Ibu Dra. Nismawati M.Kes selaku Ketua Koordinator penyuluh Kampung KB “Wr Soepratman”, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60137. Peneliti memilih informan ini dikarenakan untuk mengetahui *capacity building* individu yang ada pada penyuluh KB.
6. Ibu Dra. Sri Hayati selaku Ketua Koordinator penyuluh Kampung KB “Simbar Jaya”, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60281. Peneliti memilih informan ini dikarenakan untuk mengetahui *capacity building* individu yang ada pada penyuluh KB.
7. Bapak Rustamadji selaku masyarakat Kecamatan Semampir. Peneliti memilih informan ini untuk validasi untuk penelitian ini.
8. Ibu Tri Ratmawati selaku masyarakat Kecamatan Sawahan, Peneliti memilih informan ini untuk validasi untuk penelitian ini.
9. Ibu Mila Artiana selaku masyarakat Kecamatan Bubutan, Peneliti memilih informan ini untuk validasi untuk penelitian ini.
10. Ibu Ayda Ariati selaku masyarakat Kecamatan Sukomanunggal, Peneliti memilih informan ini untuk validasi untuk penelitian ini.
11. Ibu Dwi Sulisty Rini masyarakat Kecamatan Tambaksari, Peneliti memilih informan ini untuk validasi untuk penelitian ini.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang tidak boleh terlewatkan dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2017, hlm. 308–309) dalam penelitian kualitatif untuk dapat berjalan tentunya memerlukan data primer maupun sekunder dalam menjawab permasalahan yang diteliti, Sumber data primer ini dapat diperoleh melalui informan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan sumber data sekunder ini diperoleh dari data yang tidak diperoleh langsung dari informan namun diperoleh dari dokumen-dokumen seperti artikel surat kabar, jurnal, maupun penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dipilih yakni:

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2017, hlm. 310) menyatakan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Metode observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang akurat. Dengan melakukan observasi yang dilakukan dilapangan ini peneliti memperoleh manfaat yaitu lebih memahami mengenai konteks data terkait dengan penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2017, hlm. 313).

2. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017, hlm. 317) merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua pihak yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara tersebut dilakukan berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya untuk memperlancar proses wawancara, serta dengan tujuan untuk memperjelas arah pada wawancara yang dilakukan.

3. Dokumen

Dokumen menurut Sugiyono (2017, hlm. 329) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini dapat berupa gambar, tulisan, artikel, peraturan ataupun kebijakan yang mana dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung dari metode observasi dan wawancara agar penelitian yang diteliti lebih kredibel atau dapat dipercaya.

I.7.5 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan pada keabsahan data merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam sebuah penelitian kualitatif. Hal ini perlu dilakukan agar hasil dari penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Namun penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017, hlm. 363) seringkali berfokus pada uji validitas dan realibilitas. Validitas sendiri adalah sebuah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian, Sedangkan, reliabilitas menurut Susan Stack dalam Sugiyono (2017, hlm. 364) adalah berkaitan dengan konsistensi dan stabilitas data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2017,

hlm. 372) triangulasi adalah pengecekan data yang berasal dari berbagai sumber, berbagai data, dan berbagai waktu.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Berikut hal-hal yang dapat dicapai, yaitu dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data yang ada pada hasil wawancara. Dengan tujuan dalam penelitian ini mencoba membandingkan antara apa yang diamati mengenai suatu kondisi fisik dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.
2. Membandingkan keadaan yang ada dalam perspektif seseorang dengan pandangan orang lain
3. Realisasinya, apa yang dikatakan tentunya dalam perspektifnya biasa berbeda dengan perspektif orang lain. Dengan maksud peneliti berusaha memperoleh informasi dengan membandingkan pendapat yang berbeda tersebut.
4. Membandingkan data wawancara yang diperoleh dari informan dengan dokumen pendukung yang relevan.

I.7.6 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017, hlm. 337) dalam menganalisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah analisis data yang dilakukan:

1. Reduksi Data

Ketika melakukan proses penelitian lapangan cenderung data yang diperoleh ini cukup banyak. Maka dari itu, diperlukannya reduksi data ini agar dapat memilih hal-hal yang penting serta dapat memfokuskan pada hal yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data telah direduksi, selanjutnya melakukan penyajian data penyajian data sendiri merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti disajikan berupa uraian agar data yang telah diperoleh dapat terorganisir dan dapat mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan dua langkah sebelumnya, maka kali ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berdasarkan data-data yang telah direduksi dan telah disajikan secara terorganisir. Sehingga dari penarikan kesimpulan yang dilakukan ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Namun kesimpulan yang telah dibuat ini merupakan kesimpulan yang masih bersifat sementara, karena akan berubah seiring dengan penelitian yang dilakukan pada saat dilapangan